

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN PILKADA WALIKOTA KOTA BANJARMASIN

KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

(Studi Kasus Partai PDI-P Sebagai Partai Koalisi Pasangan

H.Ibnu Sina S.Pi – Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT)

Lulyta Putri Cahya Nintyas¹, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹Ilmu Administrasi,63201 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan, 17120022

²Ilmu Administrasi,63201 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan, 1109127301

³Ilmu Administrasi,63201 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan, 1121028803

e-mail: Lulytaputricahyanintyas@gmail.com

ABSTRAK

PDI-Perjuangan sebagai partai pendukung Pasangan Ibnu Sina dan H. Arifin Noor memegang peran yang cukup besar dalam upaya-upaya pemenangan pasangan Ibnu Sina dan H. Arifin Noor untuk menjabat kembali sebagai Walikota Banjarmasin, dan perlu dicermati juga bagaimana proses dan dukungan yang dilakukan oleh partai-partai koalisi lain terutama PDI-Perjuangan yang mendukung pasangan calon. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1) Langkah-langkah yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan sebagai partai yang berkoalisi dalam pemenangan pasangan H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor, 2) Faktor yang mendorong koalisi partai PDI Perjuangan untuk mendukung Pasangan Walikota H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian mengamati gejala-gejala yang merupakan fenomena, kondisi, hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang terjadi. Data dikumpulkan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Langkah-langkah yang dilakukan dengan membentuk tim pemenangan untuk melakukan kampanye kepada masyarakat dengan strategi kampanye kultur, kampanye menggunakan media sosial dan juga kampanye dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, 2) Faktor yang mendorong adalah karena elektabilitas populernya H. Ibnu Sina yang sudah pernah menjabat selama 1 periode dan juga melihat latar belakang dari kinerja H. Ibnu Sina perubahan apa yang dilakukan untuk Kota Banjarmasin selama menjabat 1 periode.

Kata Kunci : *Peran Partai; Koalisi PDI Perjuangan*

ABSTRACT

PDI-Perjuangan as the party supporting the Ibn Sina and H. Arifin Noor pair played a significant role in the efforts to win the Ibn Sina and H. Arifin Noor pair to serve again as Mayor of Banjarmasin, and it is also necessary to pay attention to how the process and support carried out by the other coalition parties notably PDI-Perjuangan which supported the pair. The purpose of the study was to find out 1) the steps taken by the South Kalimantan PDI-P DPD as a coalition party in winning the pair H. Ibnu Sina and H. Arifin Noor, 2) the factors that encouraged the PDI-P party coalition to support the Mayoral Pair H. Ibn Sina and H. Arifin Noor. The research method uses a qualitative approach with this type of research observing the symptoms which are phenomena, conditions, existing relationships, developing opinions, ongoing processes. Data were collected through primary data and secondary data. The data analysis used in this research is descriptive data analysis. The results of the study show 1) The steps taken by forming a winning team to conduct campaigns to the community with a culture campaign strategy, campaigns using social media and also campaigns by providing

political education to the community, 2) The driving factor is the electability of the popularity of H. Ibnu Sina, who has served for 1 period and also saw the background of the performance of H. Ibnu Sina, what changes were made to the City of Banjarmasin during his 1 term in office

Keywords: *The Role of the Party;PDI-P Coalition*

PENDAHULUAN

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan dalam konteks politik nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdesentralisasi dalam arti bahwa daerah memiliki hak untuk mengelolah daerahnya sendiri. Salah satu perubahan menuju arah politik Indonesia yang lebih demokratis adalah adanya sistem sentralistik atau seluruh pemerintahan harus dikelola oleh pusat yang diubah menjadi sistem desentralisasi dalam arti daerah memiliki hak untuk memiliki daerah sendiri dan mengelola semangat otonomi daerah.

Dalam sebuah parlementer, seorang individu saja mempunyai pengaruh kecil terhadap pembentukan organ legislatif dan eksekutif. Untuk mendapatkan pengaruh dia harus bersatu dengan individu lain yang menganut pandangan politik yang sama. Dengan demikian munculah partai politik. Pemilihan umum di mana partai politik yang mewakili kepentingan khusus warga negara. Kepentingan seperti nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, anti korupsi dalam kampanye pemilu rangka partisipasi pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya peran partai politik sangat di perlukan untuk menyukseskan pemilihan umum. Karena partai politik merupakan komponen terpenting dari Negara demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah yang di selenggarakan untuk menyeleksi para calon pemimpin di daerah tidak terlepas dari peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Seseorang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah haruslah melalui pencalonan oleh Partai Politik. Di dalam UU No.32/2004 bahwa partai politik merupakan satu-satunya pintu gerbang bagi pencalon kepala daerah. Hal tersebut di tegaskan dalam revisi ke 2 UU No. 32/2004 pasal 56 ayat (2) bahwa "Pasangan calon di usulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang di dukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan".

Selain itu partai politik meyakini bahwa ada perbedaan karakteristik antara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Pemilihan Umum

(Pemilu) legislatif. Dalam Pemilu legislatif pemilih memilih partai politik sementara Pilkada pemilih memilih orang atau kandidat yang berasal dari partai. Dalam Pilkada kandidat yang mempunyai ketokohan tinggi akan lebih di pilih, tidak peduli berasal dari partai mana. Hal ini lah yang menyebabkan betapa pentingnya tahap rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

Partai politik adalah organisasi dari kegiatan politik yang berusaha untuk mengontrol kekuasaan pemerintahan dan bersaing dengan satu atau lebih untuk mendapatkan dukungan publik lainnya. Dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah partai politik melihat pasangan calon kepala daerah yang lebih unggul ataupun memiliki elektabilitas tertinggi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah dari sinilah terbentuknya koalisi partai-partai politik untuk mengusung kandidat.

Koalisi adalah gabungan, koalisi adalah sekelompok individu yang berinteraksi yang di bentuk secara independen dari struktur organisasi formal yang terdiri dari anggota yang saling mrnguntungkan. Dalam politik koalisi adalah penggabungan dua partai atau lebih dengan tujuan membentuk pemerintahan. Hal tersebut dapat dihindari dalam proses politik suatu Negara yang menganut sistem multi partai (Lijphart, 1995).

Dalam hal ini, Pasal 42 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatur pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai, anantara lain hanya menyebut dua persyaratan penting. Pertama, kewajiban menyerahkan surat pencalonan yang di tanda tangani oleh pimpinan partai politik yang bergabung di daerah pemilihan. Kedua, kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon, yang jelas bahwa total perolehan kursi atau suara minimal parati-partai yang bergabung itu tidak kurang dari 15%. Syarat ini membuat banyak partai melakukan koalisi. Koalisi ini juga dibangun berdasarkan landasan untuk memenangkan kandidat yang diusung. Melakukan koalisi dengan banyak partai, diharapkan sumber dukungan terhadap calon akan besar.

Pada tanggal 9 Desember 2015 pemerintah menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia karena tercatat sebanyak 269 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten mengikuti pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Pelaksanaan di tiap daerah memiliki variasi kegagalan atau keberhasilan. Sepanjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menampilkan dua sisi yaitu sisi gelap dan sisi terang. Sisi gelap menunjukkan Pilkada hanya sebagai perebutan kekuasaan belaka, sedangkan sisi terangnya adalah memunculkan harapan bagi kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang di usulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan yang berhak melaksanakan Pilkada adalah KPUD. Sebagaimana bunyi pasal 57 ayat (1) pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD TK I/II. Undang-Undang ini penting untuk menampung semangat kedaulatan rakyat yang sedang berkobar mengubah status qou Pemerintah Daerah. Begitu juga peraturan Komisi Pemiliha Umum (KPU) No. 7 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan peraturan KPU No. 8 tahun 2007 tentang pedoman tata cara kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Salah satu daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada serentak tersebut adalah Kota Banjarmasin, pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tahun 2020, maka setiap partai politik di perbolehkan mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 7 tahun 2006.

Pencalonan pasangan Ibnu Sina dan H. Arifin Noor yang diusung oleh tiga partai yaitu Demokrat, PKB dan PDI-P secara umum mencakup tiga tahap penting: pertama, penjaringan calon; kedua, penyaringan dan seleksi yang telah di jaring; dan ketiga, penetapan calon. Fokus perhatian yang menjadi sorotan publik Kota Banjarmasin adalah dinamika wacana politik lokal beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pilkada Walikota Banjarmasin 2020. Hingar bingar perhelatan Pilkada semakin muncul kepermukaan, ditandai dengan maraknya manuver-manuver politik yang dilancarkan masing-masing calon Walikota dan partai yang berkoalisi melalui

sosialisasi dan kampanye tahap awal yang sangat intens untuk mentransfer ideologi, visi, misi dan platform kepartaian kedalam pikiran sadar konstituen guna mempengaruhi preferensi politik kearah pembentukan pencitraan pragmatis partai politik menjelang Pilkada Walikota Banjarmasin 2020.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang menjadi lebih terbuka dan adanya persaingan yang semakin tinggi antara para kontestan Pilkada Walikota, pemasaran politik (political marketing) bagi sebagian calon Walikota adalah metode dan cara yang dianggap tepat untuk menghasilkan kemenangan dalam Pilkada. Dalam pemasaran politik para calon harus memahami dan mengenal siapa audiennya, sehingga bisa membidik target dengan tepat dan efisien.

Suasana politik yang semakin memanas menjelang beberapa bulan menuju Pilkada Walikota Kota Banjarmasin 2020 merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam rangka memperoleh kekuasaan. Setiap calon diharuskan mampu merespon langsung ke akar rumput (grass root) guna menginvestasi dan mendengar masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pemenuhan artikulasi kepentingan masyarakat dan konstituen. Keseluruhan kegiatan ini merupakan perwujudan dalam rangka memenuhi target 35% perolehan suara dalam Pilkada Walikota Kota Banjarmasin 2020.

PDI-Perjuangan sebagai partai pendukung Pasangan Ibnu Sina dan H. Arifin Noor memegang peran yang cukup besar dalam upaya-upaya kemenangan pasangan Ibnu Sina dan H. Arifin Noor untuk menjabat kembali sebagai Walikota Banjarmasin, dan perlu dicermati juga bagaimana proses dan dukungan yang dilakukan oleh partai-partai koalisi lain terutama PDI-Perjuangan yang mendukung pasangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menjelaskan suatu fenomena melalui pengumpulan data yang dapat menghasilkan permasalahan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Peneliti ingin melihat bagaimana peran partai politik dalam kemenangan Pilkada Walikota Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Informasi penelitian dalam penelitian ini ialah Wakabid Kaderisasi dan Ideologi DPD PDI

Perjuangan Kalimantan Selatan dan masyarakat umum yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur yang dilakukan dengan suatu pedoman dan catatan yang berisi pokok permasalahan mengenai hal yang akan penelitian ini gunakan. Observasi adalah pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan. Dokumentasi penelitian ini digunakan untuk memperoleh data baik dalam bentuk arsip, foto, buku dan lainnya untuk mendukung penelitian tentang peran lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai yang diperoleh dari kantor DPC PDI Perjuangan dan Kantor Posko Pemenangan Paslon ditanyakan pada saat wawancara berlangsung. Moleong (2006: 173)

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sesuatu yang diteliti yaitu peran partai politik dalam memenangkan pilkada kota Banjarmasin tahun 2020 kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan fenomena yang sedang diamati dengan cara metode ilmiah. Dari penelitian ini tipe yang paling umum adalah penelitian sikap pendapat individu, partai, keadaan ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak pendaftaran kandidat di KPU Kota Banjarmasin Tahun 2020 aura persaingan politik diantara kandidat sudah mulai muncul. Dihadapan KPU para kandidat Pasangan Calon seolah unjuk pernyataan dengan sejumlah simbol yang dibawa serta pada saat pendaftaran. Dalam menetapkan calon kepala daerah di PDI Perjuangan partai membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil

Walikota. Setelah mendaftar calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut akan diseleksi dan diverifikasi berkas-berkasnya oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kalimantan Selatan dengan syarat ketentuan latar belakang pendidikan, alasan untuk bergabung ke PDI Perjuangan dan program Visi-Misinya. Setelah lolos diverifikasi berkas dan syarat ketentuan di DPC kemudian diajukan ke DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah sebagian prosedur seleksi calon kepala daerah yang dibuat oleh DPD Provinsi dengan DPC Kabupaten. Setelah lolos dari DPD kemudian nama-nama calon tersebut direkomendasikan agar diseleksi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP),

Adapun fenomena unik dalam Pilkada di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada di Kota Banjarmasin di ikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Wali Kota yaitu, Pasangan Calon Drs. H. Abdul Haris Makkie, M. Si dan Ilham Nor, ST yang diusung oleh partai koalisi (Gerindra, PPP, PBB) dengan partai politik pengusung Gerindra yang memperoleh 6 kursi di DPRD, 2 kursi dari partai PPP di DPRD dan 1 kursi dari partai PBB di DPRD dengan jumlah 9 kursi pendukung. Pasangan Calon Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc yang diusung oleh partai Koalisi (Golkar, PAN, PKS, Nasdem) dengan partai politik pengusung Golkar yang memperoleh 6 kursi di DPRD, 9 kursi dari partai PAN di DPRD, 5 kursi dari partai PKS di DPRD dan 1 kursi dari partai Nasdem di DPRD dengan jumlah 21 kursi pendukung. Pasangan Calon Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT yang diusung oleh partai koalisi (Demokrat, PKB, PDI-P) dengan partai politik pengusung Demokrat yang memperoleh 5 kursi di DPRD, 5 kursi dari partai PKB di DPRD dan 5 kursi dari partai PDI-P di DPRD dengan jumlah 15 kursi pendukung. Terakhir ada Pasangan Calon Drs. H. Khairul Saleh, M.Si dan Habib Muhammad Ali Al'Habsyi dengan jenis calon perseorangan.

Pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau partai gabungan yang memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini partai politik atau partai gabungan yang berkoalisi untuk mendukung pasangan calon juga wajib mengikuti persyaratan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah DPRD apabila hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahan maka perolehan 15% jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas. Kemudian baru akan boleh menjadi partai

pendukung atau partai koalisi untuk mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin.

Dari data pemilihan KPU Kota Banjarmasin surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah 459.638 suara, surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah 948 suara, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 207.854, kemudian surat suara yang digunakan berjumlah 251.460 suara. Jumlah surat

suara yang sah berjumlah 232.706, suara yang tidak sah berjumlah 18.754. Dari data tersebut dinyatakan surat suara yang tidak sah itu termasuk surat suara yang rusak dan dicoret-coret bagi mereka yang memiliki sikap Golongan Putih (GolPut). Dapat diuraikan data perolehan suara dari ke empat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin. Berikut tabel uraian hasil rekapitulasi perolehan suara dari ke empat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tahun 2020:

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M. Si ILHAM NOR, ST	36238
2.	IBNU SINA, S. Pi, M. Si Dr. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	90980
3.	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M. Si HABIB MUHAMMAD ALI AL'HABSYI	31334
4.	Hj. ANANDA H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc	74154

Dalam tabel tersebut perolehan surat suara terbanyak didapatkan oleh pasangan Ibnu Sina dan H. Arifin Noor yang berkoalisi dengan 3 partai pendukung termasuk partai PDI-Perjuangan. Dalam perolehannya mereka mendapatkan surat suara sebanyak 90.980 yang tersebar dari 5 kecamatan yang berada di Kota Banjarmasin. Pada pemilihan Pilkada di Kota Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 2020 pasangan Ibnu Sina dan H. Arifin Noor meraih 90.980 suara atau sekitar 39,10% presentase total suara yang didapatkan.

Namun dalam pemenangan tersebut terjadi sengketa pasalnya pasangan calon nomor urut empat yakni Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir menilai telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin. Pihak pasangan Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir melakukan permohonan untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan sebagian permohonan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Banjarmasin tahun 2020. Kemudian MK memerintahkan adanya pemungutan suara ulang di 3 (tiga) kelurahan yang diyakini telah terjadi pelanggaran yakni Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Setelah dilakukannya pemungutan suara ulang hasilnya akan digabungkan dengan hasil rekapitulasi sebelumnya. Saat sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang yang paling lama dilakukan dalam 30 hari kerja setelah putusan dibacakan oleh pihak MK para Kandidat atau Pasangan Calon tidak diperbolehkan melakukan kampanye ulang dan pihak MK meminta Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara. Berikut tabel hasil rekapitulasi pemilihan suara di 5 kecamatan Kota Banjarmasin sebelum dilakukannya Pemilihan Suara Ulang:

Wilayah	(01)	(02)	(03)	(04)
Banjarmasin Selatan	7.870	23.326	8.970	16.349

Banjarmasin Timur	7.110	15.799	5.750	11.255
Banjarmasin Barat	6.853	17.661	5.919	17.508
Banjarmasin Utara	8.793	21.715	5.864	17.818
Banjarmasin Tengah	5.403	11.298	4.374	9.954

Dari hasil tersebut kemudian dilakukan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah

Konstitusi di 3 Kelurahan yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2021. Karena telah dinilai 3 kelurahan dari wilayah Banjarmasin Selatan ini melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menyebabkan terjadinya sengketa yang membuat pasangan nomor urut 4 merasa keberatan dengan hasil yang diperoleh. Pasangan Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir menggugat atas kemenangan Pasangan Calon nomor urut 2 Ibnu Sina dan H. Arifin Noor yang di rasa telah melakukan pelanggaran dengan cara intimidasi terhadap masyarakat di daerah Banjarmasin Selatan dan dengan melakukan Politik Uang di daerah tersebut terutama di kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan. Melalui beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan pasangan nomor urut 4 Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir dan kemudian dilakukan lah Pemilihan Suara Ulang. Namun sebagian besar masyarakat menilai hal tersebut bukan jaminan tidak akan terjadinya lagi kecurangan dalam Pemilihan Ulang. Hasil akhir tersebut menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu Ibnu Sina dan H. Arifin Noor yang diusung oleh 3 partai koalisi yaitu Demokrat, PKB dan PDI-Perjuangan masih meraih suara terbanyak di 3 Kelurahan yang melakukan pemungutan suara ulang dengan hasil akhir 89.378 suara sah. Dengan adanya proses baru atau penerapan baru dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarmasin menjadi Pemilihan Suara Ulang terakhir yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin dan tidak akan terjadi lagi Pemilihan Suara Ulang karena gugatan kecurangan yang terjadi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan peran partai PDI Perjuangan dalam pemenangan pasangan H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 ada berbagai bentuk upaya dan langkah yang dilakukan

partai PDI Perjuangan sebagai partai yang bekoalisi mendukung dalam pemenangan.

Adanya Visi dan Misi partai PDI Perjuangan yang dinilai sejalan dengan Visi dan Misi yang dimiliki Pasangan H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor. Sebagaimana tujuan-tujuan tersebut dikampanyekan kepada masyarakat. Dilihat dari latar belakang H. Ibnu Sina pada saat menjabat 1 periode program-program yang ingin dilakukan Pasangan H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor untuk melakukan perubahan lebih banyak untuk Kota Banjarmasin membuat partai PDI Perjuangan semakin yakin untuk memberikan dukungan sepenuhnya agar kedua pasangan meraih kemenangan.

Konsolidasi dengan membentuk partai koalisi yang mendukung pasangan H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor di Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020. Ada 3 partai yang turut berkoalisi yang tergabung di dalamnya yaitu, Demokrat, PKB dan PDI Perjuangan. Sebagai partai yang berkoalisi mendukung pemenangan PDI Perjuangan menjalin komunikasi yang baik dengan kader yang didukungnya dan partai-partai lainnya yang turut berkoalisi mendukung H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor.

Strategi dan upaya yang dilakukan PDI Perjuangan dengan pendekatan kultur merupakan pendekatan yang dianggap lebih mudah untuk mendaptakn simpatik masyarakat dalam kampanye. Melihat masyarakat di Kota Banjarmasin sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta perilaku sopan santun dalam berbicara berdasarkan norma-noma adat. Maka PDI Perjuangan sesuai dengan platform visi dan misi partai di dalam amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan bahwa partai berkepribadian secara budaya dan menerapkan langkah dan upaya ini untuk mempererat hubungan emosional antara pemilih dan pasangan H. Ibnu Sina dan H. Arifin Noor ke tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana kedua pasangan ini merupakan etnis suku Banjar sehingga bagi mereka tidak terlalu sulit untuk berkampanye di masyarakat. Upaya lain yang digunakan PDI Perjuangan dalam mendukung pasangan H. Ibnu Sina dan Arifin Noor dengan

menggunakan media sosial sebagai alat kampanye yang merupakan bagian dari pembentuk opini publik. Menurut partai PDI Perjuangan penggunaan media sosial untuk berkampanye dinilai sangat efektif dan efisien.

Upaya lain juga diberikan partai PDI Perjuangan untuk mendukung karena sebagai partai yang turut berkoalisi PDI Perjuangan harus memberikan yang terbaik agar pasangan yang didukung meraih kemenangan. Dan tidak jarang pihak lawan menyerang dengan isu-isu yang memunculkan dugaan politik uang dan membuat PSU yang dilakukan di 3 Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Namun PDI Perjuangan tidak semerta-merta diam dan mengaburkan isu-isu yang terjadi dengan turun langsung ke masyarakat, mensosialisasikan apa saja capaian yang sudah diberikan H. Ibnu Sina kepada Kota Banjarmasin pada saat menjabat. Kampanye dengan cara seperti itu dinilai cukup efektif untuk diterapkan.

SARAN

Dari hasil penelitian ini, penulis ada beberapa saran yang harus diperhatikan PDI Perjuangan dalam rangka pemenangan Pasangan yang didukung pada pemilihan kepala daerah yaitu :

1. Sosialisasi politik yang dibuat oleh partai PDI Perjuangan diharapkan agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Banjarmasin. Karena masyarakat di Kota Banjarmasin masih banyak yang kurang edukasi mengenai pemilihan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan.
2. Diharapkan agar partai PDI Perjuangan lebih sering turun ke masyarakat mendengarkan aspirasi rakyat bagaimana keinginan rakyat untuk daerahnya kedepannya tidak hanya pada saat menjelang pemilihan saja. Karena hal tersebut akan membuat masyarakat merasa mereka diperlukan dalam pemilihan.
3. PDI Perjuangan diharapkan untuk tetap berkomitmen tidak terjadinya politik uang pada pemilihan sebagai pendukung atau pun mengusung kader-kadernya di pemilihan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahmani H.I, 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 1997. *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, Anggota IKAPI
- Herbert, Feith dan, Lance Castles, 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES
- Herbert, Feith, 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia
- Labolo, Muhadam, 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Yusuf, Muri, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Arimi, 2017. *Partai Politik Dalam Pemenangan Suyatno dan Jamiludin Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015*. JOM FISIP Vol. 4 No. 1
- Fauziah, Sundari, Rhesty, 2016. *Strategi Koalisi Partai Politik dalam Pemenangan Pasangan Zulkifli AS dan Ekon Suharjo Pada Pemilukada di Kota Dumai Tahun 2015*. JOM FISIP Vol.3 No. 2
- Razaqtiar, Zaafril, Arief, 2016. *Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono – Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013*. Jurnal Politik Muda, Vol. 5 No. 3
- Syukri, Ahamd dan Meilandi, Ricky, 2018. *Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan AW Nofidi Mawardi – Ilyas Panji Alam pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Organ Ilir Tahun 2015*. Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 2 No. 1

